



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

Asa 28 Raperda



Nama Baru



Nama itu pembeda. Sekaligus juga harapan. Di dalamnya ada asa para pemberi nama. Begitu pun dengan perubahan nama majalah ini: dari *Biwara* menjadi *Cirebon Katon*. Terdapat maksud dua hal tersebut.

Pertama, kami berharap nama baru ini bisa menjadi pembeda dengan majalah sejenis. Ada beberapa nama majalah DPRD yang juga menggunakan nama *Biwara* (atau *Bewara*), di antaranya DPRD Provinsi Jabar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bantul. Juga, ada majalah komunitas di Jabar yang menggunakan nama yang sama.

Dengan menjadi *Cirebon Katon* diharapkan penyebutan itu langsung merujuk pada majalah DPRD Kabupaten Cirebon. Sehingga tidak ada lagi yang bertanya: “*Biwara* yang mana yah? Jabar apa Tasik?” Maklum nama itu cukup generik.

Untuk itulah kami mencari nama yang unik dan merepresentasikan Kabupaten Cirebon.

Selain menggunakan kata ‘cirebon’, pilihan ‘katon’ yang merupakan kosakata bahasa Cirebon, diharapkan menambah kekhasan sebagai pembeda.

Kedua, ada asa di balik *Cirebon Katon*. Dengan nama ini, diharapkan bukan hanya memberi kabar atau mengumumkan (*biwara*), tapi juga membuat kinerja DPRD, dan pemerintah Kabupaten Cirebon secara umum, bisa terlihat dan disaksikan masyarakat.

Karena faktor agar bisa terlihat itulah, kami melakukan perubahan besar terhadap perwajahan majalah. Dengan tampilan baru ini semoga semakin enak dilihat, nyaman dibaca, lebih komunikatif, dan bisa dibanggakan sebagai produk jurnalistik.

Bila sebelumnya hanya beberapa halaman yang tampil berwarna, dengan nama baru ini kami mempersembahkan semua halaman tersaji *full color*. Ukuran majalah pun kami sesuaikan agar mudah dibaca, disimpan, dan dibawa.

Dari sisi isi (konten) dan penulisan, kami berupaya mengemasnya semaksimal mungkin dalam standar jurnalistik yang baik. Dengan harapan pesan yang disampaikan dapat mudah diterima dan enak dibaca.

Meski demikian, perubahan ini bukanlah sesuatu yang final. Kami menyadari masih banyak kekurangan. Untuk itu kami sangat berharap kritikan dan masukan dari pembaca demi perbaikan yang berkesinambungan.

Pembaca, dengan kerendahan hati, kami mengucapkan selamat menikmati segala perubahan tersebut. Selamat membaca *Cirebon Katon*.

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag persidangan)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Mochammad Nurhiyana, S.STP., M.Si
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Wiwin Winarti, S.IP
(Kasubag Rapat dan Risalah)

Ardiles Afla Jatiwanto
(Kasubag Rumah Tangga)

Redaktur :

IA Fazri

Reporter :

Firman • Maulana • Adi • Yusuf • Mahardika

Fotografer :

Alfian

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman • Ihsan

Distribusi :

Adiw

Korespondensi :

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon

• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Ada Asa di 28 Raperda

9 | Ketua Bapemperda Muklisin Nalahudin:
Memastikan Perda Bermanfaat Bagi Rakyat



14 | KILAS

Meningkatkan Literasi Bersama Pado Maco



18 | PUBLIKA

Jalan Tak Berlampu dan Berpalang Pintu



20 | LENSA

Kisah Kemarau Mencaplok Keindahan Setu Patok



22 | DINAMIKA KOMISI

Komisi I: Pemerintahan Pacak Rakyat Rancak

24 | Komisi II: Hidup tak Lagi Susah, Cari Kerja Mudah

26 | Komisi III: Pembangunan Merata Sampah Sirna

28 | Komisi IV: Masyarakat Cerdas, Waras, dan Bergas



30 | INSPIRASI

Eko Wisata Mangrove Ambulu
Wow-nya Gak Habis-Habis!



33 | PROFIL

Fraksi Partai Golkar
Berkarya untuk Rakyat

36 | POTENSI

Wisata Religi: Kaya Nilai Belum Berbingkai

Ada Asa di 28 Raperda

DPRD dan Pemda sama-sama mengusulkan 14 Raperda. Akankah usulan itu sudah menjawab kebutuhan rakyat? Atau malah sebaliknya?



-foto: foto dok setwan

Tenaga baru, semangat baru. Masa sidang 2020 pun *gaspol*. DPRD Kabupaten Cirebon siap tampil trengginas menyusun legislasi. Payung hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah nyata yang dihadapi masyarakat siap dibuat.

“Tidak ada jalan lain masalah itu di depan mata. Harapan masyarakat begitu besar. Kita harus menjawabnya,” ujar Mohamad Luthfi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

Ucapan Luthfi, dan tekad DPRD, tentu bukan tanpa dasar. Setumpuk keluhan masyarakat menyergap begitu mereka dilantik. “Sebenarnya tanpa mereka berkeluh pun kita bisa melihat secara

kasat mata tumpukan sampah ada dimana-mana, pelayanan Jamkes tidak jelas,” jelasnya.

Atas keprihatinan itulah DPRD Kabupaten Cirebon, menurut Luthfi, harus menjadi motor perubahan. “Kita dekat dengan rakyat, mendengar dan merasakan. Harapan mereka, asa mereka, adalah semangat bagi kami,” ujarnya.

Semangat DPRD ini pun bisa dilihat dari gebrakan 14 Raperda yang mereka usulkan. Ke-14 raperda itu semuanya merupakan jawaban atas berbagai permasalahan masyarakat, dan tentu saja menyangkut hajat hidup orang banyak.

Di bidang sarana umum DPRD menyiapkan Per-

“*Tidak ada jalan lain masalah itu di depan mata. Harapan masyarakat begitu besar. Kita harus menjawabnya....*”

”
da soal pengelolaan sampah dan pemakaman umum. Di bidang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan ada Perda perdagangan dan jasa, UMKM, holding Bumdes, dan kawasan industri.

Sedangkan di bidang pelayanan publik ada Perda Jamkes, sistem data tunggal, pemerintahan desa dan BPD, serta

sistem retribusi. “Sistem data tunggal ini akan menjadi basis penyelesaian berbagai masalah rakyat, seperti penerima bansos dan jamkes,” jelasnya.

Sementara itu untuk menyelesaikan langsung masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat disiapkan Raperda tentang gaji guru madrasah dan imam masjid, pemberdayaan anak, kepemudaan dan olahraga, dan pemberdayaan penyandang masalah sosial.

Selain 14 Raperda yang diusulkan DPRD, pada masa sidang kali ini DPRD juga akan menggodok Raperda inisiatif dari pemerintah daerah. Kebetulan, usulan Pemda juga sama sebanyak 14 Raperda. Total ada 28 Raperda yang akan dibahas DPRD.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), yang bertugas menggodok Raperda itu, menyambut baik 28 usulan

tersebut. Ketua Bapemperda menilai bahwa ke-28 Raperda sudah mencerminkan kebutuhan Kabupaten Cirebon.

“Baik eksekutif maupun legislatif dalam pembuatan Raperda tentu melalui kajian yang komprehensif. Misalnya penganggaran sampah ini jelas sesuai kebutuhan masyarakat. Secara sosiologis juga Raperda tidak merugikan masyarakat,” jelas Ketua Bapemperda Muklisin Nalahudin.

Proses Raperda menjadi Perda tentu tidak semudah membalikkan tangan. Ada tahapan panjang yang harus dilalui. Setidaknya ada delapan tahapan yang harus dilalui hingga Raperda itu diundangkan.

Semoga tahapan itu semakin menguatkan asa dan harapan masyarakat. Langkah awal regulasi bisa menjadi landasan segala perubahan di Kabupaten Cirebon. Kita tunggu saja. •fal/suf/udi



-foto: foto dok setwan

14 Raperda Inisiatif DPRD

1	Raperda tentang Perusahaan Perdagangan dan Jasa (PPJ) [Perubahan atas Perda No.16/2007]	Hal mendasar yang membuat perubahan Perda 16/2007 karena PPJ sampai saat ini belum jalan dan belum menghasilkan PAD untuk Kabupaten Cirebon. Raperda Perubahan akan mempertajam dan memperjelas panduan teknis dan operasional. <i>Output</i> -nya untuk meningkatkan PAD.
2	Raperda tentang Pendidikan Diniyah Takmilyah Awwaliyah (MDTA) [Perubahan atas Perda No. 2/2009]	Perubahan perlu dilakukan karena pelaksanaan Perda No.2/2009 dianggap tidak maksimal. Perlu ada panduan lebih teknis dan operasional hingga kewajiban Pemda untuk memperhatikan dan mensejahterakan guru ngaji, penyuluh agama, imam mushola, dan para hafidz/ah.
3	Raperda tentang Pemerintah Desa dan BPD [Perubahan PerdaNo.1/2017]	Pemilihan Kuwu Serentak sering membuat berbagai polemik pasca-pemilihan. Banyak terjadi kebijakan berdasarkan kepentingan Kuwu. DPRD memandang perlu melakukan perubahan Perda agar lebih jelas tugas fungsi kepala desa dan BPD, terutama terkait perangkat desa dan mekanisme pemilihan kuwu, dan pasca-pemilihan kuwu.
4	Raperda tentang Pengelolaan Sampah	Sebelumnya sudah ada Perda No.07/ 2012 tentang Pengelolaan Sampah, namun dianggap belum mampu menyelesaikan persoalan sampah. Perda tersebut perlu ditarik dan akan dibuat naskah akademik baru dan Perda baru. Perda baru harus mengatur secara detail pengelolaan sampah dari tingkat desa hingga kabupaten.
5	Raperda tentang Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan	Kabupaten Cirebon saat ini memiliki usia produktif cukup banyak, menurut data BPS (2018), mencapai 20% lebih dan 30% dibawah 40 tahun. Maka harus Pemuda diberikan ruang dan wadah untuk menciptakan inovasi, kreativitas, dan prestasi pemuda. Perlu ada Raperda tentang pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
6	Raperda tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pajak & Retribusi Daerah)	Menjadi kewajiban Pemda meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Harus diatur dengan jelas dan rinci strategi dan cara agar Pemda mampu meningkatkan PAD khususnya, melalui pajak dan redistribusi daerah.
7	Raperda Tentang Tata Kelola dan Pembentukan Holding BumDes	Sebelumnya sudah ada Perbup yang mewajibkan setiap desa membentuk Bumdes.Maka perlu adanya tata kelola dan pembentukan holding Bumdes untuk membantu pemasaran dan distribusi barang/produk yang dihasilkan. Perda diharapkan mampu menciptakan daya saing dan produk menembus pasar nasional.
8	Raperda Tentang Pengelolaan Kebijakan Satu Data (Single Data System)	Saat ini banyak kesalahan pendataan Jamkes, Jamsos,l dan bentuk bantuan lainnya untuk masyarakat. Perda diharapkan akan mensinkronisasi dan mengintegrasikan data (Satu Data) Disdukcapil, Dinsos, Dinkes, Diskominfo, BPJS, dan lembaga lainnya. Persoalan perbedaan data bisa diselesaikan.

9	Raperda Tentang Jaminan Kesehatan	Perda ini akan mengatur ketentuan dan kriteria orang yang berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan. Perda juga akan membahas detail masalah jaminan kesehatan lainnya.
10	Raperda tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).	Perda ini diharapkan akan mampu mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, menciptakan 1.000 enterpreneur muda, dan menciptakan inovasi dan kreativitas putra daerah.
11	Raperda tentang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Perda akan menjelaskan detail tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); menjelaskan kategori miskin di Kabupaten Cirebon; dan melakukan strategi penyelesaian masalah.
12	Raperda tentang Pemakaman Umum	Perda ini akan mengatur desa yang tidak memiliki tanah desa untuk tempat pemakaman, maka desa bisa membeli tanah, dan tidak boleh ada pemakaman komersil.
13	Raperda Tentang Wilayah Kawasan Industri	Dengan Perda ini akan ada panduan untuk membuat kawasan industri. Sehingga diharapkan tumbuh ekosistem industri di Cirebon yang mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan PAD, dan mendatangkan investasi.
14	Raperda Tentang KPAID	Perda ini akan memiliki <i>output</i> membentuk sebuah Komisi Perempuan Anak Indonesia Daerah (KPAID) yang berfungsi melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Upaya perlindungan perempuan dan anak harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

14 Raperda Inisiatif Pemda

1	Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019	Ini Perda rutin. Setiap tahun Bupati membuat Pertanggungjawaban APBD. Perda ini berisi realisasi pendapatan dan belanja selama tahun anggaran 2019.
2	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Bupati dan DPRD bersama melakukan evaluasi dan penyusunan Perubahan APBD tahun 2020 dan dituangkan dalam Raperda Perubahan APBD 2020 bertujuan untuk lebih efisien, efektif, dan optimal.
3	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021	Bupati dan DPRD bersama-sama menyusun Perda tentang APBD 2021, dengan harapan menghasilkan penyusunan APBD yang maksimal dengan output dan outcome yang jelas.
4	Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar [Perubahan atas Perda No. 5/2011]	Perubahan Perda bertujuan untuk meningkatkan PAD melalui retribusi pelayanan pasar, dan membuat skema yang jelas sistem retribusi di Pasar.
5	Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah [Perubahan atas Perda No.12/2016]	Perubahan bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan; dan mewujudkan kelembagaan yang efektif dengan adanya keselarasan nomenklatur dengan regulasi di atasnya.

6	Raperda tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi [Perubahan kedua atas Perda No.8/2011]	Ada satu pasal yang diubah yaitu Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: Jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebanyak 2 (dua) kali per menara per tahun. Ini mengikuti regulasi di atasnya.
7	Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok	Raperda bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para perokok pasif dari bahaya asap rokok; memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; serta melindungi kesehatan masyarakat umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.
8	Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah	Perda ini dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, serta penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik yang berorientasi pada pelayanan umum. Perlu adanya kebijakan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab.
9	Raperda tentang Pokok-Pokok Raperda tentang Pengelolaan Pasar	Perkembangan perekonomian telah memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang dikelola oleh Pemda maupun swasta. Untuk itu perlu Perda agar mengoptimalkan fungsi pasar, meningkatkan pelayanan kepada pedagang, dan aturan bagi pengelolaan pasar.
10	Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perda ini untuk menyesuaikan dengan PP No. 27/ 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana telah mengatur mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian.
11	Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Perlu penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Ini demi peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat; serta untuk peningkatan pengembangan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial.
12	Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Akibat berkurangnya lahan produktif karena banyaknya alih fungsi lahan maka Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
13	Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat. Maka diperlukan Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Cirebon.
14	Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Untuk menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta menjaga sistem kearsipan yang dinamis. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang andal.

Ketua Bapemperda Muklisin Nalahudin Memastikan Perda Bermanfaat Bagi Rakyat

Ada beberapa kasus di daerah lain Perda justru dianggap merugikan masyarakat. Agar hal itu tidak terjadi di Kabupaten Cirebon, Seperti apakah upaya yang dilakukan Bapemperda?



Foto aihan/ck

Untuk bisa diundangkan menjadi Perda, Raperda harus melalui proses yang panjang. Ia harus melalui dinamika kajian para ahli, belum lagi pro dan kontra di masyarakat. Perlu ketelitian, kesabaran, dan kegigihan. Proses itu semua

digawangi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Untuk mengetahui bagaimana proses pengesahan Perda yang bermanfaat bagi rakyat. Redaksi Cirebon Katon mewawancarai **Ketua Bapemperda Muklisin Nalahudin**. Berikut petikannya:

Apa sih sebenarnya yang menjadi dasar dalam pembuatan Perda?

Pertama, tentu dasarnya adalah Perundang-undangan. Dimana dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perda berada pada urutan paling bawah. Urutan teratas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, dasarnya dalam hal pembuatan Perda berdasarkan kebutuhan dari eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ketiga, sebagaimana tugas dan fungsi Bapemperda sendiri dalam mengharmonisasi Raperda, dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Untuk Raperda tahun ini ada 28 yang rencananya akan disahkan. Sebanyak 14 Raperda usulan eksekutif dan 14 usulan legislatif.

Eksekutif mengusulkan 14 Raperda, legislatif juga. Bagaimana menurut Bapak apakah sudah mencerminkan permasalahan masyarakat yang ada? Atau sudah sesuai aspirasi?

Kalau dari Eksekutif, bagaimanapun dinas sudah melalui kajian teknis dan melalui usulan anggota DPRD. Kemudian, kalau usulan dari DPRD itu pasti, karena tiap bulan kita ada rapat fraksi, dan itu melalui aspirasi. Berdasarkan usulan dari dewan, fraksi ataupun usulan anggota DPRD lainnya.

Jadi, baik eksekutif maupun legislatif dalam pembuatan raperda tentu melalui kajian yang komprehensif. Misalnya terkait penanggulangan sampah ini jelas sesuai kebutuhan masyarakat, dan ini menjadi skala prioritas perda yang akan se-



-foto-foto dok setwan

cepatnya disahkan. Kemudian dalam kajiannya juga harus melihat aspek sosiologis, jangan sampai malah merugikan masyarakat. Artinya perda yang diusulkan sesuai kebutuhan.

Oh begitu, lalu apa strateginya agar 28 Raperda ini bisa secepatnya tersahkan?

Strateginya, kita membahas keseriusan anggarannya terlebih dahulu sehingga anggarannya tidak terserap kembali ke eksekutif. Kemudian, Raperda yang sudah siap maka akan disahkan secepatnya.

Lalu, apakah ada hambatan dalam mengesahkan 28 Raperda ini?

Hambatannya, kemungkinan ada Raperda yang tidak bisa disahkan untuk tahun 2020, karena kita harus realistis terkait dukungan anggaran dan permasalahan teknis di lapangan. Jadi hal itu yang menjadi hambatan sejauh ini. Namun, kita tetap

akan upayakan secara maksimal bisa disahkan semua.

Kapan target penyelesaian 28 Raperda ini?

Target penyelesaiannya nanti akan kita sortir dulu. Berapa usulan eksekutif yang akan diperbaiki maupun penambahan dan kemungkinan akan selesai di tahun 2021.

Karena ini berkaitan soal kesiapan soal naskah akademik. Sehingga, memang tidak bisa selesai di tahun ini. Hal itu sudah biasa, berdasarkan pengalaman, memang selalu meninggalkan pekerjaan rumah.

Dari 28 Raperda mana yang menjadi skala prioritas?

Skala prioritas adalah Raperda soal sampah yang akan kita sahkan secepatnya. Karena permasalahan sampah sudah sangat kronis. Kita punya lahan sampah yang masih menyewa, sementara tahun 2021 akan habis katanya. Dari



-foto-foto dok setwan

424 desa dan kelurahan, dan 2,2 juta penduduk Kabupaten Cirebon, tiap hari satu rumah bisa menyumbangkan kurang lebih 10 kilo sampah, maka bisa dikalkulasikan, masyarakat kita menyumbangkan 100 ton sampah per hari.

Seperti apa rencana percepatannya?

Rencana berdasarkan rapat Bapemperda, kita akan menilai yang sudah siap dan menjadi skala prioritas. Setelah itu baru membentuk pansus dalam rapat paripurna.

Adakah kerjasama pihak luar dalam pembuatan perda?

Tentu, kita selalu membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengolahan naskah akademik, karena harus ada tenaga ahli dalam bidangnya. Ada doktor, professor, rektor ataupun dekan dari Perguru-

an Tinggi yang ada di Cirebon.

Kita bekerjasama dengan kampus lokal UGJ, UMC dan sebagainya kita selalu libatkan mereka. Selain itu, soal sampah misalnya, kita undang ahli biologi. Terkait anak, kita undang dokter anak, dengan metode FGD (kelompok diskusi, red). Sehingga ketika Perda jadi ini sudah melalui kajian yang komprehensif dalam lingkup Kabupaten Cirebon.

Apakah ada jaminan ketika Raperda sudah disahkan akan mengurangi masalah?

Tentu, karena dalam pembuatan Perda bertujuan agar ada kepastian hukum, berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan sudah melalui kajian yang mendalam.

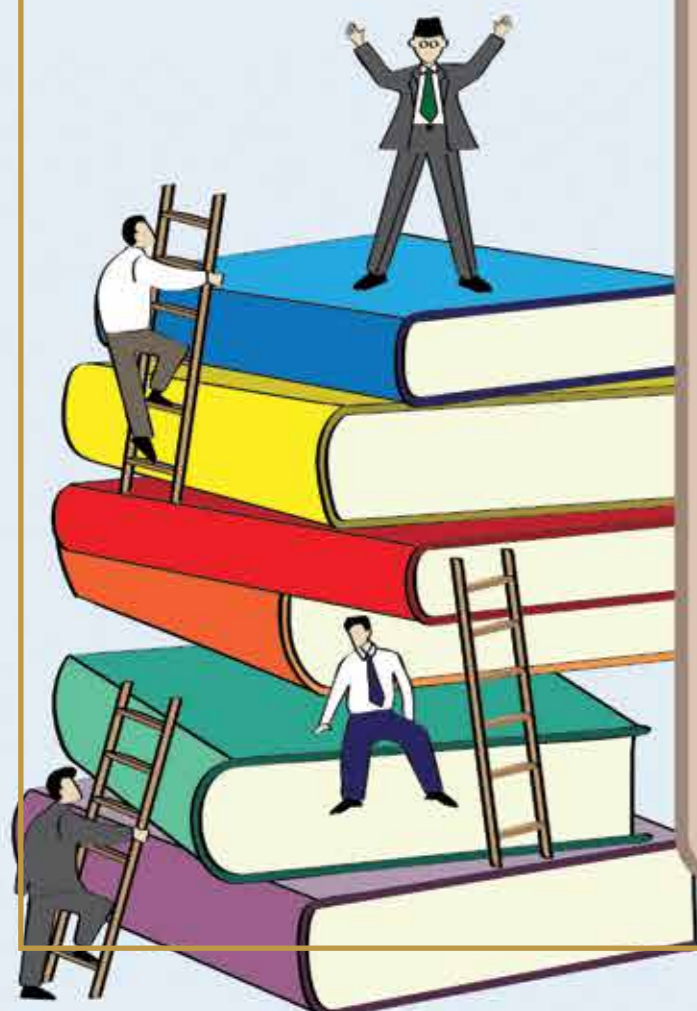
Visi Bapemperda sendiri seperti apa?

Visi tentu terciptanya Perda yang sejalan dengan PP Nomor 12 Tahun 2018. Adapun Misi-nya, dengan membantu dan bertugas dalam membuat Perda yang berkualitas. Sekalipun hukum bersifat memaksa. Tetapi harus bersifat sosiologis, agar adanya perda ini bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Apakah yang perlu dilakukan untuk menunjang kinerja Bapemperda?

Bapemperda yang baik, menurut saya itu yang menerima berbagai pendapat, masukan dan banyak belajar. Kemudian, harus lebih banyak rapat dan *hearing* pendapat dari berbagai ahli dengan melakukan berbagai forum grup diskusi dan lain sebagainya. Karna FGD termasuk penguatan dalam pengolahan naskah akademik. •suf

Jalan Panjang Menjadi Perda



2 PEMBAHASAN

- Melakukan pembedahan persoalan/masalah.
- Studi Komparatif.
- Bedah naskah raperda bersama bagian hukum.
- Pembahasan Draft.
- Sosialisasi / Uji Publik
- Finalisasi Draft Raperda.

3 FASILITASI GUBERNUR

Bupati menyampaikan permohonan fasilitasi kepada Gubernur terhadap Raperda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemda dengan DPRD.

6 PENGAJUAN NOMOR REGISTER

Bupati mengajukan permohonan nomor registrasi kepada gubernur setelah bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Raperda yang telah dievaluasi gubernur.

5 EVALUASI GUBERNUR

Bupati menyampaikan Raperda kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.

4 PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN

Hasil Fasilitasi gubernur ditindaklanjuti oleh Pemda untuk penyempurnaan sebelum ditetapkan.

7 PENETAPAN

Raperda yang telah disetujui bersama ditetapkan oleh bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Raperda disetujui.

8 PENGUNDANGAN

Untuk dapat diketahui setiap orang, Perda harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.



Meningkatkan Literasi Bersama Pado Maco

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Komunitas Taman Baca Pado Maco Kecamatan Suranenggala. Taman baca yang didirikan oleh Warkinah telah mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat provinsi dan nasional. Kunjungan ini dalam rangka memberikan dukungan terhadap upaya menumbuhkan minat baca.



Foto-foto dok setiawan

Periksa Perizinan Perusahaan

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Mad Saleh, memimpin kunker memeriksa perizinan PT. Longrich, Desa Sida Resmi, Kecamatan Pabedilan. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Dinas PMPTSP, Camat dan Muspika Pabedilan, Kuwu Desa Sidaresmi, Kuwu Babakanlosari, dan Kuwu Babakanlosari Lor.



Foto-foto dok setiawan

Memantau Pengelolaan Lingkungan Perusahaan

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinas Lingkungan Hidup berkunjung ke PT Sido Agung Agro Prima di Kecamatan Pangenan. Kunjungan kerja ini dalam rangka *monitoring* tingkat kepatuhan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.



Foto-foto dok setwan

Inventarisasi Masalah Sarana Pendidikan

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon berkunjung ke Kecamatan Susukan dalam rangka pembahasan sarana prasarana pendidikan di Kecamatan Susukan. Dihadiri pula oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, perwakilan kepada SD se-Kecamatan Susukan, dan Sekretariat DPRD Kab. Cirebon.



Foto-foto dok setwan

Jalan Tak Berlampu dan Berpalang Pintu



Tanya:

Assalamu'alaikum. Yang terhormat seluruh Bapak/Ibu DPRD. Saya Lutfi (22) warga Desa Dompjong Kulon. Desa kami terletak di ujung perbatasan Kecamatan Karang Sembung. Jalan menuju desa kami terdapat rel kereta yang tidak ada palang pintunya. Selain itu, jalan menuju desa kami juga belum ada lampu penerang jalannya sepanjang 700 meter. Sehingga ketika malam hari rawan kecelakaan kendaraan dan beberapa kali menelan korban.

Kami ingin ada penerangan jalan dan minimal pos penjaga pintu palang kereta api. Mohon kiranya bapak/ibu DPRD bisa meneruskan aspirasi Kami. Terimakasih. **Lutfi (22), Mahasiswa, Warga Dompjong Kulon**

Jawab:

Terimakasih informasinya Lutfi. Kami akan coba cek status jalan dan sampaikan ke PT Kereta Api Indonesia.

Perlu Penataan Alun-Alun Ciledug

Tanya:

Tiap malam alun-alun di Kecamatan Ciledug sangat ramai, menjadi pusat hiburan dan perbelanjaan bagi warga Cirebon yang ada di wilayah timur. Terutama di hari libur dan akhir pekan. Tak ayal berbagai kegiatan seremonial juga sering diadakan di tempat ini.

Namun, kondisi alun-alun belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Karena sejauh ini, belum ada penataan dan pengelolaan secara baik. Sehingga keberadaan alun-alun ini cenderung terlihat tak elok.

Oleh karenanya perlu adanya perhatian dari pemerintah agar selain menjadi tempat wisata belanja, juga bisa menjadi tempat santai yang nyaman bagi pengunjung.

Kami harap bapak/ibu dewan bisa mendorong pihak kecamatan. Terimakasih. **Supriyadi (24), Damarguna.**

Jawab:

Supriyadi terimakasih informasinya. Usulannya akan kami teruskan ke pemerintah kecamatan terkait.



Udara Jalan Penuh Debu Limbah Pabrik



Tanya:

Saya Tata Wijaya (26) warga Desa Citemu. Saya seorang karyawan di salah satu pabrik Gas di Mundu. Kadang kala saya pulang malam hari ketika dapat jadwal shift sore. Namun semenjak beberapa pabrik berdiri di sekitaran jalan Mundu-Astanajapura, pulang malam menjadi khawatir. Lantaran di jalan Kanci ketika malam, jalan menjadi buram karna gumpalan asap dan pasir

yang menghalangi pandangan.

Hal itu biasanya terjadi pada pukul 22.00 - 02.00 dini hari. Awalnya saya pikir itu adalah pasir yang berada di sekitaran jalan karena tertiuip angin. Namun, sudah 1 tahun lebih saya sering merasakan ini. Dan menurut saya hal ini bukan hanya akibat pasir, namun juga karena asap pabrik. Asap pabrik biasanya dibuang pada malam hari melalui cerobong asap yang sangat besar di atas pabrik.

Hal ini tentu menjadi permasalahan bagi warga sekitar dan kekhawatiran bagi pengendara yang akan melintas, terutama pengendara motor. Tak jarang pula beberapa kecelakaan terjadi di malam hari. Saya harap, bapak ibu Dewan bisa memberi solusi terkait permasalahan asap pabrik maupun pasir berserakan yang ada di daerah kami, terimakasih. **Tata Wijaya (26), Karyawan – Mundu**

Jawab:

Terimakasih informasinya Tata. Kalau memang benar seperti apa yang dilaporkan, maka sistem pembuangan limbah/asap pabrik harus diuji, apakah sudah memenuhi standar kelayakan. Kami akan melakukan pengecekan lapangan dan berkoordinasi dengan dinas terkait.

Sungai Ciberes Penuh Sampah

Tanya:

Sungai Ciberes merupakan sungai yang berada di sepanjang Desa Dompjong Wetan, Kalimekar, Kalimaro, Gebang Kulon, Gebang Mekar yang bermuara ke laut. Tiga tahun lalu, sungai ini masih sering dilewati perahu nelayan sepulang dari laut.

Namun, kondisi sungai hari ini sangat memprihatinkan. Sungai ini tak lagi difungsikan sebagai jalur alternatif nelayan. Hal ini dikarenakan kondisi sungai yang dipenuhi sampah, akibat beberapa TPS yang berdiri di sekitar hilir sungai.

Bahkan di bawah jembatan penghubung desa Gebang dan Gebang Kulon kondisi volume sampah yang besar membuat air terhambat mengalir.

Kami ingin ada pengerukan sampah di Sungai Ciberes. Karena, sudah beberapa tahun belum ada pengerukan lagi. Kami khawatir ketika musim penghujan tiba akan membuat banjir.

Semoga Bapak Ibu Dewan bisa mendorong dinas terkait untuk melakukan program pengerukan sampah



seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Terimakasih **Ihsanuddin - Gebang Kulon**

Jawab:

Informasi dan usulan yang baik. Terimakasih Ihsanudin. Akan kami teruskan ke dinas terkait.

Kisah Kemarau Mencaplok Keindahan Setu Patok

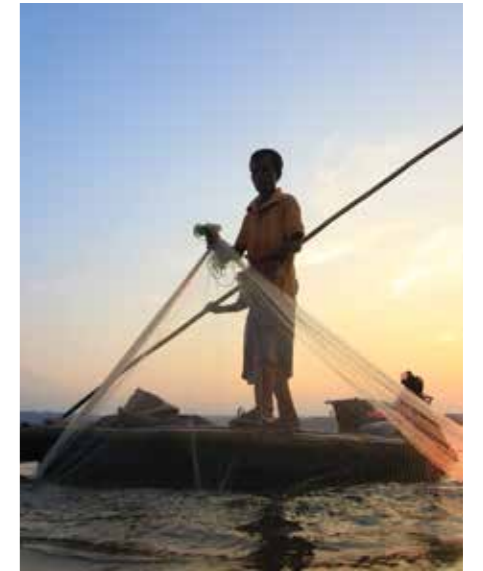
Setu Patok mengairi 1.365 hektare area pertanian, yang berada di tiga kecamatan dan 18 desa. Selain itu, Setu Patok sebenarnya menjadi objek wisata lokal. Setiap hari di waktu sore, sedikitnya 300 orang duduk menikmati pemandangan setu. Terlebih di hari libur.

Di sudut yang lain, kesejukan udara, membuat sarana track olahraga lari kian asyik. Ada juga yang berenang. Ada pula yang mencoba peruntungan: menjala ikan.

Kapasitas Setu Patok di Desa Setupatok, Mundu, sebenarnya 1,9 juta meter kubik. Debit air waduk seluas 65 hektar itu terus menyusut. "Ini belum puncak kemarau, kalau kemarau sudah jadi jalanan umum, dan sawah dadakan," jelas Supardi (52) warga sekitar setu.

Pasokan air sepertinya bermasalah. Mata air mengering. Perlu ada pembenahan. Sehingga kisah kemarau mencaplok keindahan Setu Patok tidak terulang lagi. **-vik**

•Foto: foto aihan/ck



Komisi I: Pemerintahan Pacak Rakyat Rancak

Jika aparaturnya profesional bekerja, rakyat akan lebih berdaya. Pembinaan SKPD pun menjadi jalan yang akan ditempuh Komisi I.



Foto: foto dok. setman

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja aparaturnya di pemerintahan Kabupaten Cirebon banyak disorot. Sering terjadi mutasi, membuat pemerintahan berjalan kurang efektif.

Kasus hukum atas dugaan praktik jual beli jabatan beberapa waktu lalu menjadi momentum perubahan. Saatnya pemerintahan, baik dari sisi sistem maupun kinerja ASN, di Kabupaten Cirebon dibenahi.

Kondisi itu juga yang menjadi perhatian Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan Tupoksi-nya, Komisi I akan mengawasi pembenahan melalui hubungan kemitraan yang baik dengan pemerintah.

"Kami akan menjadi mitra pemerintah daerah yang dinamis, demokratis, dan aspiratif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon," ujar Abdul Rohman, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

Untuk mencapai itu Rohman akan berupaya meningkatkan efektifitas dan kinerja Komisi I dalam menginventarisasi permasalahan dan aspirasi ma-

sarakat. "Terutama di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya.

Komisi I ingin agar pemerintahan pacak alias terlatih, mahir, dan cakap dalam bekerja. Profesionalisme ASN harus benar-benar dijunjung. Kinerja ASN adalah kunci agar anggaran benar-benar terserap untuk kesejahteraan rakyat.

"Untuk itu kami akan melakukan pembenahan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red) pemerintahan dengan melakukan kebijakan regulasi yang sesuai dan dinamis, itu fokus utamanya, terutama dinas-dinas strategis ranah pelaksana. Kita akan bangun kemitraan," ujar Rohman.

Mitra Komisi I di pemerintahan ada sekitar 14 SKPD: Bapelitbangda, Disdukcapil, BKPSDM, Kantor Kearsipan, Kominfo, Kantor Perijinan Penanaman Modal dan Satap, BKAD, Setda Bagian Hukum, Setda Bagian Pemerintahan, Setda Bagian Organisasi, DPMD, Kesbangpol, Satpol PP, dan Kecamatan.

Tentu saja agar pembenahan benar-benar dirasakan masyarakat harus dilaksanakan hingga ting-

kat kecamatan, bahkan desa. Jika pemerintahan benar-benar pacak profesional, diharapkan rakyat bisa rancak, alias giat dan gembira. "Rakyat bisa bahagia dan berdaya," tandasnya.

Dari sisi legislasi, Komisi I ingin produk hukum benar-benar digarap secara serius. "Produk hukum yang dirancang dalam sebuah peraturan daerah itu bisa ter-sahkan sesuai target," jelasnya. Bulan April DPRD Kabupaten Cirebon ditargetkan membentuk Alat Kelengkapan DPR (AKD) sejumlah 4 pansus.

Dimana masing-masing pansus ini membahas dan merancang Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sesuai yang disepakati dalam paripurna waktu itu. "Pansus 1 soal ranperda kearsipan, Pansus 2 soal ranperda pemakaman, Pansus 3 soal ranperda penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pansus 4 soal ranperda menara telekomunikasi," ungkap Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Dapil 7 ini.

Dengan terbentuk AKD itu diharapkan legislasi berjalan lancar. "Mohon doanya agar proses berikutnya dan pengesahannya secepatnya bisa terealisasi," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I Diah Irwany Indriyati menilai bahwa indikator tercapainya visi Komisi I adalah maksimalnya peran dewan sebagai panyambung aspirasi masyarakat. Ini bisa dilihat pada implementasinya ke dalam bentuk fungsi dan tugasnya sebagai anggota dewan.



"Biasanya melalui agenda reses, pada saat Musrenbang kecamatan, dan saya akan bersyukur sekali jika kami anggota DPRD ini bisa diundang juga dalam agenda Musrenbangdes," ujar Anggota DPRD Fraksi Golkar ini.

Musrenbangdes menurut Diah sangat strategis untuk menggali aspirasi masyarakat. "Padahal saat itulah anggota DPRD ini bisa hearing dengar pendapat, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen, sekaligus bercengkerama dan berkoordinasi langsung dengan mereka tanpa ada pembatas, dan disitulah kita bisa tahu apa dan bagaimana se-nyatanya kondisi konstituen kita," katanya. •suf

KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN, MELIPUTI:

1. Pemerintahan
2. Keamanan, ketertiban dan ketentraman
3. Hukum dan perundang-undangan
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Keperpustakaan
6. Kearsipan dan dokumentasi
7. Kepegawaian (aparatur pemerintah) dan diklat
8. Sosial politik dan organisasi kemasyarakatan
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan catatan sipil
11. Komunikasi dan informasi
12. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa/kelurahan
13. Perizinan
14. Perencanaan dan pengawasan

SUSUNAN ANGGOTA KOMISI I

No	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	Abdul Rohman	F. PDI PERJUANGAN	Ketua
2	Diah Irwany Indriyati, S.Ap	F. P. GOLKAR	Wakil Ketua
3	Nurholis, S.Pd.I	F. PKS	Sekretaris
4	Pandi, SE	F. PKB	Anggota
5	R. Hasan Basori, SE., M.Si	F. PKB	Anggota
6	Hj. Amenah, SE	F. PDI PERJUANGAN	Anggota
7	Yayat Hidayat, ST	F. P. GOLKAR	Anggota
8	H. Sofwan, ST	F. P. GERINDRA	Anggota
9	Suryanti	F. P. NASDEM	Anggota
10	Junaedi, ST	F. PKS	Anggota
11	Tarseni	F. P. DEMOKRAT	Anggota

Komis II: Hidup tak Lagi Susah, Cari Kerja Mudah

Urip angel, rega larang kabeh, pengen kerja keder. Begitulah keluhan masyarakat. Potensi industri di Kabupaten Cirebon mampukah menjadi jawaban? Bagaimana komisii menjawabnya?



Foto: foto dok setman

Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi bermula dari keterbatasan lapangan kerja. Potensi industri di Kabupaten Cirebon seyogyanya mampu memutus persoalan tersebut. Namun perlu disadari bahwa mekanisme perusahaan dalam merekrut pekerja memiliki standar. Jika SDM di sekitar industri tidak mumpuni tentu tidak dilirik.

Keterbatasan penyerapan tenaga kerja harus disikapi dengan menyiapkan solusi konkret. Misalnya tetap melibatkan warga sekitar dalam proses produksi namun dilakukan secara rumahan (*Home Industry*). "Tidak semua masyarakat bisa masuk menjadi pekerja, misalnya karena usia. Maka berdayakan saja seperti ibu-ibu di rumah untuk mensuplay pabrikan," jelas Mad Saleh.

"Kita kan banyak ibu-ibu di rumah yang bisa diberdayakan untuk bekerja dari rumah. Mereka bisa menghasilkan produk yang bisa digunakan untuk mensuplay perusahaan. Sambil jaga anak, melayani keluarga, mereka juga tetap bisa berpenghasilan membantu ekonomi keluarganya," lanjutnya.

Adapun proses menyiapkan SDM berkualitas untuk kebutuhan industri, Komisii mendorong agar Balai Latihan Kerja (BLK) ditingkatkan. Pelatihan yang dilakukan harus sesuai kebutuhan industri. "Menambah balai pelatihan, ini dikhususkan untuk meng-cover apabila pendidikan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar," terangnya.

Komisii juga mendorong industri memberi prioritas kepada warga sekitar. Pola semacam ini akan banyak mengentaskan masalah pengangguran. Perlu juga peran perusahaan dalam pemberdayaan.

Setiap perusahaan harus mengeluarkan dana CSR. Pengelolaan dana CSR diprioritaskan pada pemberdayaan masyarakat. Penyediaan akses keterampilan dan peningkatan produktivitas masyarakat diutamakan. "CSR perusahaan harus dapat dikelola untuk pemberdayaan masyarakat, misalnya UKM," jelasnya.

Komisii melihat pengembangan UKM sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Banyak program yang digelontorkan oleh peme-

rintah, namun tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. "Kita kedepankan program yang membantu UKM misal mereka yang hanya bermodal 200-300 ribu," terangnya.

"Pemda kan punya BPR, berilah KUR untuk UKM kita agar mereka tidak sampai berhutang pada bank semok. Perhatikan mereka, jangan hanya fokus pada nasabah atau masyarakat yang sudah berkecukupan. Pemberian dana KUR harus tepat sasaran, dinas terkait harus memperhatikan," pungkasnya.

Program pemberdayaan seperti kepada UKM atau lainnya harus dilakukan oleh semua dinas. Sebagai contoh, dinas pertanian, mereka harus mampu menjadikan petani berdaya. Dorong mereka agar menghasilkan produktivitas pertanian yang berkualitas. Masyarakat harus bangga menjadi petani. Petani pun harus memiliki regenerasi.

Melambungnya harga-harga barang kebutuhan pokok disebabkan oleh ketidakberdayaan di sektor pertanian. Baik secara sistem penanaman maupun pasca panen. "Dinas pertanian harus memperhatikan para petani. Jika pertanian maju dan petani sejahtera, maka harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan," jelasnya.

Tersedia dan terjangkaunya harga kebutuhan pokok menjadi prioritas kebijakan. "Seluruh dinas harus bekerja keras dan memiliki keterukuran target kinerja. Antara teori dalam kebijakan dengan



Foto dok mad saleh

aplikasi di lapangan harus sinkron. Jangan sampai semua hanya menjadi retorika dan tidak berdampak apapun untuk masyarakat," sambungnya.

Terfasilitasinya masyarakat mengakses pekerjaan maka pengangguran terentaskan. Cari kerja mudah. Pemberdayaan masyarakat melalui UKM memperkuat perekonomian. "Kalau ekonomi kuat, hidup jadi nggak susah," tandasnya

Terpenuhinya kebutuhan pokok dengan harga murah membuat masyarakat sumringah. "Kita mendorong semua dinas agar dapat mewujudkan harapan masyarakat dan membuat mereka bahagia," pungkasnya. •Mol

KOMISII BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, MELIPUTI:

1. Perekonomian
2. Perindustrian dan Perdagangan
3. Kelautan dan Perikanan
4. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan
5. Ketahanan Pangan
6. Koperasi dan UKM
7. Penanaman Modal
8. Keuangan Daerah
9. Perpajakan dan Retribusi
10. Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha dan Perbankan
11. Perizinan
12. Perencanaan dan pengawasan

SUSUNAN ANGGOTA KOMISII

No	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	Mad Saleh	F. PKB	Ketua
2	Drs. H. Mohammad Ridwan, M. Pd. I	F. PKS	Wakil Ketua
3	H. Khanafi, SH	F. P. GOLKAR	Sekretaris
4	Emha Syahirul Alam, S. Pd.I	F. PKB	Anggota
5	H. Mustofa, SH	F. PDI PERJUANGAN	Anggota
6	Rohayati, A. Md.	F. PDI PERJUANGAN	Anggota
7	Sofatillah, SH	F. P. GERINDRA	Anggota
8	R. Cakra Suseno, SH	F. P. GERINDRA	Anggota
9	Munawir, SH	F. P. NASDEM	Anggota
10	Titi Sumanti	F. P. NASDEM	Anggota
11	Mamat Surahmat	F. P. DEMOKRAT	Anggota

Komis III: Pembangunan Merata Sampah Sirna

Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sampah sudah darurat. Jika telat, masyarakat semakin mengumpat. Tidak ada jalan lain: harus cepat. Mampukah?



Foto: foto dok sntman

Komis III banjir aduan masyarakat. Infrastruktur, terutama sarana jalan, paling banyak dikeluhkan. Pun dengan sampah yang menggunung dan berserak di pinggir jalan. Mengganggu dan mengancam ketahanan kesehatan.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto, pun bertekad komisi yang dipimpinnya mengawal pemerataan pembangunan infrastruktur. Ia juga Cirebon harus segera bebas sampah.

“Pembangunan harus merata bisa dirasakan semua masyarakat. Sampah juga harus sirna dari jalanan dan tempat yang bukan semestinya untuk mengelola sampah,” jelas Hermanto.

Hermanto menilai ingin ke depan pembangunan infrastruktur harus merata di semua kecamatan. Dengan pemerataan akan menciptakan suasana kondusif, dan tercipta sinergitas antarkecamatan dengan baik.

“Pemerataan di 40 kecamatan ini harus menjadi prioritas pemerintah. Intinya seluruh wilayah Ka-

bupaten Cirebon merasakan pembangunan,” kata Hermanto.

Pemerataan pembangunan infrastruktur, sambung Hermanto, dimaksudkan agar seluruh wilayah dapat merasakan keadilan. Karena perkembangan infrastruktur di daerah paling mudah untuk dilihat dan disaksikan.

“Kenapa harus adil? Supaya semua masyarakat bisa merasakan hasil pengelolaan yang dilakukan oleh eksekutif,” jelasnya.

Untuk mewujudkan itu semua, komisi III akan terus melakukan fungsinya baik secara pengawasan, anggaran, dan legislasi. “Kita pastikan anggaran benar-benar untuk pembangunan dan kita siapkan perda jika diperlukan. Kita akan terus berjuang hingga pemerataan pembangunan terjadi,” bebernya.

Oleh karena itu, dinas-dinas terkait pembangunan infrastruktur, baik yang berkaitan dengan perencanaan maupun eksekusi akan terus dipantau.

“Kita masih pantau dinas-dinas teknis agar cepat melakukan *planning* yang terbaik,” ujarnya.

Hermanto menilai masih banyak dinas yang belum kerja secara maksimal. Hal itu dapat dilihat dari penyerapan anggaran pembangunan di wilayah Kabupaten Cirebon.

“Indikator kerja atau tidaknya bisa dilihat dari penyerapan anggaran, jadi kami terus menekan agar dinas teknis mengerjakan secara serius seperti yang tercantum dalam Rencana Anggaran Kerja,” ungkap dia.

Selain itu untuk mempercepat pemerataan pembangunan komisi III terus melakukan pemantauan lapangan dan aspirasi masyarakat. “Sekarang kita sedang lakukan inventarisasi permasalahan karena sampai sekarang pembangunan secara fakta masih tidak merata,” ucap dia.

Sementara itu terkait dengan visi Kabupaten Cirebon bebas sampah, Hermanto mengaku masih melakukan pembahasan dengan dinas lingkungan hidup (DLH). “Kita masih terus lakukan pengkajian dengan DLH, ingin tau aja apa masalahnya dan kendala yang dihadapi oleh mereka (DLH,red),” tuturnya.

Ia menilai hingga kini Kabupaten Cirebon masih darurat sampah. Banyak Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ilegal yang tersebar wilayah Kabupaten Cirebon.



Foto: hermanto/facebook

“Benar-benar darurat, itu kan bisa dilihat masih banyaknya TPS ilegal di desa-desa bahkan di blok desa juga ada,” ujar dia.

Dari berbagai upaya DLH yang selalu gagal untuk menyediakan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) itu menjadi catatan penting bagi pihaknya. “TPPAS belum ada ini jadi catatan penting bagi kami kenapa selalu gagal,” ucap dia.

Padahal untuk mewujudkan Cirebon bebas sampah salah satu syarat yang harus ada adalah terbangunnya TPPAS. Persoalan sampah adalah cerminan dua visi komisi III: pembangunan infrastruktur (pengelolaan sampah) dan sampah itu sendiri. •tho

KOMISI III BIDANG PEMBANGUNAN, MELIPUTI:

1. Pembangunan
2. Pekerjaan Umum
3. Perumahan
4. Sumber daya air
5. Tata ruang
6. Perhubungan
7. Lingkungan hidup
8. Pertambangan dan energi
9. Pertamanan, kebersihan
10. Pemadaman kebakaran
11. Perizinan
12. Perencanaan dan pengawasan

SUSUNAN ANGGOTA KOMISI III

No	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	Hermanto, SH	F. P. NASDEM	Ketua
2	Syahril Romadhony, SE	F. PDI PERJUANGAN	Wakil Ketua
3	H. Mahmud Jawa, SH	F. P. DEMOKRAT	Sekretaris
4	H. Darusa, SH	F. PKB	Anggota
5	DR. Hj. Hanifah, MA	F. PKB	Anggota
6	Carila Rohandi, SE	F. PDI PERJUANGAN	Anggota
7	Anto Maulana, ST., MM	F. P. GOLKAR	Anggota
8	H. Mulus Trisla Ageng, SE	F. P. GERINDRA	Anggota
9	Hj. Eryati	F. P. GERINDRA	Anggota
10	Dra. Tati Suhaeti	F. P. NASDEM	Anggota
11	Nova Fikrotushofiyah, Lc	F. PKS	Anggota
12	Muklisin Nalahudin, SH., MH	F. P. DEMOKRAT	Anggota

Komisi IV: Masyarakat Cerdas, Waras, dan Bergas

Indikator pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan di Kabupaten Cirebon bisa disebut lampu merah. Tertinggal dibanding kabupaten lain di Jabar. Lantas bagaimana langkah komisi IV mengubahnya?



Foto: foto alifan/da

Tingkat masyarakat berpendidikan di Kabupaten Cirebon cukup memprihatinkan. Wajib belajar 12 tahun, yang dicanangkan, masih jauh dari kenyataan. Data menunjukkan bahwa rata-rata orang Cirebon menempuh pendidikan formal selama 6,7 tahun.

“Partisipasi sekolah kita baru 6,7 tahun. Lulus SMP saja belum apalagi 12 tahun,” jelas Rasida, Ketua Komisi IV DPRD Kab. Cirebon.

Belum lagi persoalan kesejahteraan pendidik dan rusaknya sarana dan prasarana. “Kita menyaksikan bangunan sekolah yang ambruk dan tidak layak. Penggunaan buku paket yang belum ideal, padahal penting sebagai penunjang belajar,” sambungnya.

Menjawab persoalan tersebut, Komisi IV mendorong agar program penyeteraan diaktifkan. “Program penyeteraan ini penting sebab dalam dunia kerja dibutuhkan Ijazah. Agar Ijazah yang dikeluarkan dapat diimbangi dengan kemampuan, maka program harus dilaksanakan secara berkualitas ses-

uai peraturan yang berlaku,” terangnya.

Persoalan dalam dunia pendidikan bukan hanya tanggung jawab Pemda atau sekolah, namun semua stakeholder. Orang tua dan masyarakat harus berperan aktif dalam mewujudkan pendidikan berkualitas.

“Jika Pemda tidak mampu secara pendanaan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan. Kita minta Dinas Pendidikan agar berinisiatif mengusulkan perda yang mengatur partisipasi orang tua. Tentu partisipasi ini diperuntukkan bagi mereka yang mampu,” usulnya.

Meningkatkan kualitas pendidikan harus diimbangi dengan kesejahteraan pendidik. “Perda tentang guru honorer itu sudah ada. Di sana dijelaskan tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang yang berlaku dan diatur oleh Keputusan Bupati. Ini yang masih belum dilaksanakan,” jelasnya.

Terpenuhinya kebutuhan dasar menjadi pangkal

kesejahteraan. Masalah sosial seperti kriminalitas berawal dari perut yang lapar. Menjadi kewajiban negara dan Pemda untuk hadir memenuhi kebutuhan dasar warganya. Upaya pun dilakukan, seperti memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Karut marutnya data menjadi hambatan.

“Jika persoalan data tidak beres-beres nanti pemberian bansos tidak tepat sasaran, yang kaya dapat sementara masyarakat pra sejahtera tidak. Ini tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi dan justru menciptakan kesenjangan baru,” jelas Rasida.

Kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah harus diperjuangkan. Jangan sampai mereka terisih dan hanya menjadi objek pesakitan kebijakan. Komisi IV mendorong dinas sosial dan dinas terkait supaya bekerja secara serius. “Pemda dan Dinas terkait harus bekerja keras dan membuat skema kerja dengan target hasil yang jelas,” pungkasnya.

Kesehatan menjadi modal produktivitas masyarakat. Bagaimana masyarakat produktif dalam belajar dan bekerja ketika mereka sakit? Oleh karena itu, kesehatan harus diperhatikan. Pemerintah sebetulnya sudah memfasilitasi lewat Jaminan Kesehatan. Namun lagi-lagi data menjadi persoalan.

Karut marutnya data jaminan kesehatan yang ditanggung Pemda berakibat pada *double* nya pembayaran BPJS sebagai pelaksana JKN. “Kita ini dirugikan dengan adanya data ganda yang masuk ke BPJS,” ungkapnya.



Masalah lain datang dari masyarakat yang belum tercover oleh JKN atau yang dinonaktifkan. Tidak tercovernya masyarakat menengah kebawah menjadi nestapa. Persoalan sakit tidak dapat ditawar dengan waktu “entar”. Tidak sedikit kasus masyarakat yang melayang nyawanya hanya karena persoalan tersebut.

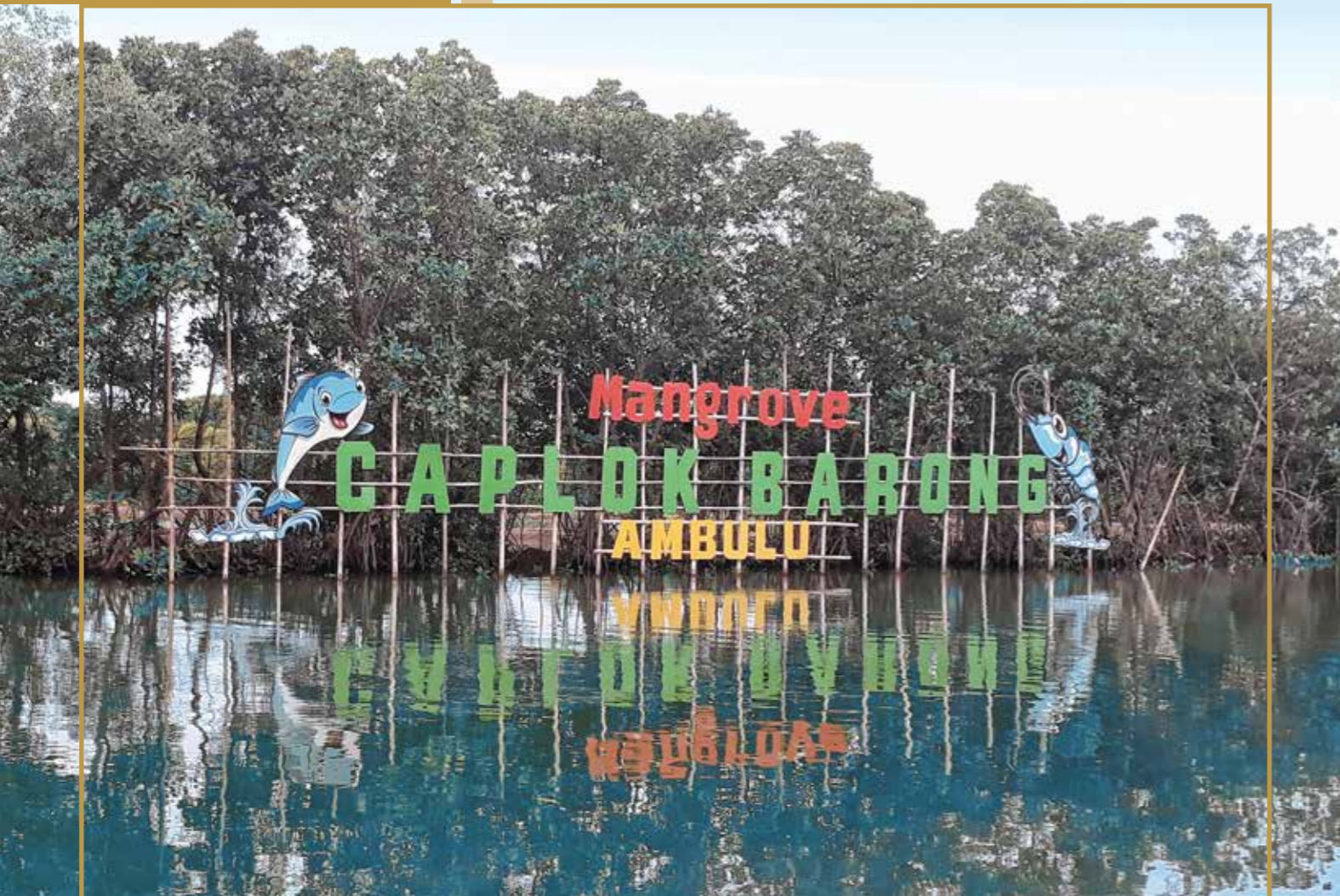
Sederet permasalahan yang menjadi perhatian khusus komisi IV untuk segera dituntaskan. “Kita panggil pihak terkait, seperti Dinsos, Dinkes, dan pihak BPJS. Bahkan kita juga melibatkan para kepala desa agar ikut membantu. Langkah ini dilakukan sebagai upaya konkrit agar masyarakat cerdas, berpendidikan cukup, sehat waras, sejahtera bergas menghadapi hidup,” Pungkasnya. •Mol

KOMISI IV BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, MELIPUTI:

1. Kesejahteraan Rakyat
2. Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Kesehatan
4. Ketenaga kerjaan
5. Transmigrasi
6. Keagamaan
7. Pengadaan pangan, logistik dan kesejahteraan
8. Pemberdayaan perempuan, peranakan wanita dan keluarga berencana
9. Kebudayaan
10. Pariwisata
11. Pemuda dan olahraga
12. Perizinan
13. Perencanaan dan pengawasan

SUSUNAN ANGGOTA KOMISI III

No	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM	F. P. GOLKAR	Ketua
2	Ahmad Fawaz, S.Tp	F. PKS	Wakil Ketua
3	H. Mahmudi	F. PKB	Sekretaris
4	H. Tanung Hidayat	F. PKB	Anggota
5	Hj. Ismiyatul Fathiyah Yusuf, B.COM., MPA	F. PKB	Anggota
6	Aan Setiawan, S.Pd	F. PDI PERJUANGAN	Anggota
7	Yoga Setiawan, SE	F. PDI PERJUANGAN	Anggota
8	Siska Karina, SH., MH	F. P. GOLKAR	Anggota
9	Hj. Nana Kencanawati, S.Pd	F. P. GERINDRA	Anggota
10	Asep Zenudin Budiman	F. P. NASDEM	Anggota
11	Moch. Gofur Akbar	F. NASDEM	Anggota
12	Heriyanto, ST	F. P. DEMOKRAT	Anggota



Eko Wisata Mangrove Ambulu Wow-nya Gak Habis-Habis!

Ekowisata itu bernama Caplok Barong. Sekilas terkesan mistis. Namun setelah mengitarinya, yang tersisa justru kenangan manis.

Seemilir angin laut terasa begitu sejuk menerpa wajah. Langkah kaki terasa ringan menyusuri hijaunya dedaunan bakau. Eksotisme pancaran sang surya yang hendak kembali ke peraduan menambah kesahduan. Riak air sungai tak kalah elok di sela hilir mudik perahu-perahu khas nelayan. Keindahan alam berpadu dengan kreativitas tangan pemuda Ambulu.

Hutan bakau biasa kini bermetamorfosa menjadi destinasi ekowisata yang tertata. Bermula dari ke-

jelian sekelompok pemuda yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) melihat potensi. Kala itu mereka menyaksikan fenomena unik nan menggelitik. Bangunan baru stasiun Losari banyak dikunjungi masyarakat, bak tempat wisata.

“Masa stasiun yang hanya begitu bisa ramai dikunjungi masyarakat untuk mencari hiburan. Apalagi hutan bakau atau mangrove yang jelas indah dan sejuk. Masa sih tidak bisa menjadi objek tujuan wisata masyarakat untuk mendapat hiburan,”

cetus Johar, Ketua Pengelola Ekowisata Caplok Barong.

Berbekal pengalaman menjadi aktivis lingkungan, pengurus Bumdes Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon pun membangun destinasi wisata hutan mangrove. “Awalnya kami melihat potensi hutan bakau, ditambah ilmu tentang pengelolaan hutan bakau yang didapat dari warga negara Belanda,” ceritanya.

Mereka pun mulai serius menata hutan dan menggarap wahana wisata. Ini bisa disebut banting setir bagi Bumdes. Pasalnya, garapan awal Bumdes adalah pengolahan sampah, namun hasilnya belum signifikan.

Caplok Barong itulah nama yang mereka pilih. Merek yang diambil dari nama jembatan yang ada di dekat lokasi wisata. Caplok barong adalah dua kata yang memiliki nilai historis bagi masyarakat. *Caplok* merupakan istilah untuk menyebut alat pengeruk yang digunakan pada pembangunan jalan. Sementara *barong* merupakan makhluk mis-

tis yang dikaitkan dengan keangkeran tempat tersebut pada masa lalu.

Meski sekilas beraroma mistis, namun begitu memasuki area wisata dan mencoba wahana yang ada, kesan itu tidak ada sama sekali. “Yang ada justru kenangan manis,” ujarnya.

Sebagai salah satu unit usaha yang dikelola Bumdes, awalnya ekowisata ini berdiri dengan modal Rp 100 Juta. Buah dari perencanaan yang matang, pada bulan Februari 2019 dilakukan pematokan bambu. Pertanda dimulainya pembuatan ekowisata mangrove Caplok Barong. Selang dua bulan, tepatnya April 2019, menjelang bulan puasa, ekowisata ini dibuka untuk umum.

Ekowisata Caplok Barong mengusung konsep wisata hutan bakau yang hits dan instagramable. Dengan semangat “Wownya gak habis-habis”, banyak spot unik dan keren tersedia. Pengunjung dimanjakan dengan lorong hutan bakau, susunan jalan bambu, serta aksesoris ar-

tistik. Selain itu ada beberapa spot seperti miniatur menara eifel dari bambu, yang memanjakan mata pengunjung untuk melihat pemandangan dari ketinggian.

Selain beberapa bentuk kreasi artistik yang memukau, disini juga terdapat saung-saung di atas sungai. Spot nyaman untuk bersantai sambil menikmati semilir angin pantai. “Banyak wahana lah, yang bikin pengunjung wow lagi wow lagi. Karena pengunjung akan selalu menemukan hal-hal baru yang keren dan unik disini,” jelas Markis, Komisaris Bumdes Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon.

Tidak salah jika ekowisata ini sering dipuji sebagai destinasi wisata yang bisa berkembang pesat. Pengelola sangat optimis terus berinovasi agar ekowisata ini menjadi destinasi unggulan di Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon. “Wisatawan datang dari Majalengka, Kuningan, Indramayu, bahkan Jawa Tengah,” Ungkap Markis.



foto: foto maubana/fk





Tiket masuk ekowisata ini hanya Rp 5.000 per orang. Sangat murah dengan fasilitas wisata yang wah! Pengunjung juga dapat menikmati keindahan aliran sungai dan sekelilingnya dengan menaiki perahu nelayan dengan jasa Rp 10.000 per orang.

Pengelola lebih banyak mengenalkan ekowisata ini lewat media sosial. Terutama melalui akun instagram @desaambul. Itulah yang membuat Caplok Barong dikenal masyarakat luas, meski berumur kurang dari satu tahun.

Wisatawan juga datang dari luar negeri. "Kita juga pernah kedatangan wisatawan dari mancanegara. Meskipun dia datang bersama warga sini yang bekerja disana, namun mereka sangat antusias dan merespon positif," jelas Johar.

Rata-rata jumlah pengunjung dalam satu hari sebanyak 50 sam-

pai dengan 100 orang. Paling banyak saat *weekend*, bisa mencapai 5 kali lipat. "Disini juga bisa jadi tempat acara seperti ulang tahun atau lainnya," terang Johar.

"Kita juga sudah pernah dikunjungi oleh berbagai dinas, ketua DPRD Kabupaten Cirebon, dan Bupati Kabupaten Cirebon," jelas Markis. "Bahkan kita juga sering kedatangan tamu dari luar daerah termasuk pengelola wisata untuk study banding," sambungnya.

Rencananya, ekowisata ini akan dikembangkan lebih unik dan keren. "Kita sudah mendapat dukungan. InsyaAllah kedepan aka ada pasar apung, masjid apung, wisata malam berupa pemancingan agar bisa menambah pemasukan. Bahkan ada rencana akan membuat semacam penginapan," jelas Markis.

Pengembangan demi menaikkan pemasukan. Jika saat ini

mereka dapat menerima pemasukan sebesar Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan. Maka target mereka kedepan diatas Rp 30 juta. "Pada tahun pertama ini berhasil memberikan PAD sebesar Rp 12 juta. Alhamdulillah PAD kita terbesar se-kecamatan Losari," terang Johar.

Semangat memajukan ekowisata mangrove juga lahir dari niatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pасalnya selama ini masyarakat hanya bergantung pada kondisi laut untuk berlayar. Namun adanya ekowisata diharapkan masyarakat terbantu dengan pemberdayaan yang dilakukan. Masyarakat dapat membuka usaha dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.

"Kita lakukan pemberdayaan masyarakat, agar mereka mampu memenuhi kebutuhan tanpa harus bergantung pada hasil tangkapan ikan. Dengan adanya ekowisata ini masyarakat dilibatkan untuk berperan serta mengisi sektor-sektor ekonomi. Seperti warung, souvenir, dan juga akan dibuatkan rumah produksi ikan bandeng sebagai ciri khas Losari," jelas Markis.

Sedangkan dari aspek pemasaran, Caplok Barong berencana menggelar berbagai event untuk menarik pengunjung. Salah satunya lomba fotografi. "Kita juga akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk membuat paket-paket wisata," jelasnya.

Semangat dan optimisme 12 pengelola Caplok Barong ini semoga terus menginspirasi Bumdes lainnya. Kita tunggu kreativitas apalagi yang kan mereka lahirkan. Oh ya kita masih punya cukup wow kok untuk kreativitas barumu. *Gak bakal habis, wooooow!* •mol

Fraksi Partai Golkar Berkarya untuk Rakyat

Bagi kader Golkar, politik adalah jalan pengabdian dan perjuangan. Aspirasi masyarakat harus diwujudkan dengan semangat kekaryaan. Bagaimana bisa?



PD Golkar Kabupaten Cirebon telah memberikan bantuan berupa APD bagi tenaga medis di dua rumah sakit. Yakni di RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled

Ekistensi partai berlambang pohon beringin hingga kini tetap kokoh. Pergantian era tidak serta merta membuat partai yang pernah berkuasa selama 32 tahun ini tumbang. Era millennial justru tumbuh kader-kader muda Golkar yang solid dan mantap berkiprah. Pun dengan fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cirebon.

Muda berkarya begitulah semangat yang mereka usung. "Kami ingin mewujudkan Kabupaten Cirebon maju, damai, masyarakat yang mandiri, punya semangat kekaryaan, masyarakat

yang beriman dan bertaqwa. Itulah visi kami," jelas Anton Maulana, Ketua Fraksi Partai Golkar.

Menjadi wakil rakyat adalah sebuah amanah besar. Menjadi jembatan rakyat untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Komitmen Golkar untuk menggapai visi tersebut diupayakan dengan menjaring kader-kader terbaik. Membina dan menanamkan semangat kekaryaan untuk membantu masyarakat.

Setiap anggota dewan fraksi Golkar harus selalu terjun ke masyarakat. Mendengarkan keluh kesah mereka dan menam-

pung semua aspirasi. Menjadikan masyarakat sebagai objek yang harus dilayani dengan menikmati program-program pemerintah. "Kita kedepankan ekonomi kerakyatan. Tidak seperti dahulu Ketika hanya elit dan konglomerat yang menikmati, tapi sekarang kita harus kedepankan UMKM," jelasnya.

Program ekonomi kerakyatan dinilai mampu menaikkan derajat UMKM. Banyak masyarakat kecil dan menengah yang selama ini kesulitan akan terbantu. Program-program seperti bantuan permodalan, pember-

dayaan, dan pendampingan harus ditingkatkan. Geliat UMKM dan meningkatnya pendapatan masyarakat berimplikasi pada indeks kebahagiaan masyarakat.

Kinerja maksimal dimulai dari solidaritas internal. Maka fraksi Partai Golkar terus berupaya menjaga komunikasi. Setiap satu bulan sekali mereka mengadakan rapat rutin dan beberapa rapat insidental. Mempertajam fungsi anggota legislatif sebagaimana yang diharapkan masyarakat. “Melakukan controlling dan mendorong program pemerintah agar dirasakan oleh masyarakat,” jelas Anton.



Partai Golkar memberikan bantuan berupa beras bagi masyarakat di tiga Kecamatan yakni di Tengahtani, Kedawung dan Suranenggala Kabupaten Cirebon

-foto: siska karina/instagram

Anton Maulana Sang Pemimpi



-foto: aifan/ik

“Saya ini Pemimpi,” cetus Maulana. “Mimpi mewujudkan sesuatu yang lebih baik. Saya bermimpi agar Kabupaten Cirebon bersih, bebas sampah, bebas pengangguran, dan jalan mulus. Saya ingin bermanfaat bagi orang lain,” sambung Anton.

Politik baginya adalah jalan silaturahmi. Karena keberadaannya dalam ruang politik berawal dari kebiasaannya bersilaturahmi

mi dan berkumpul bersama masyarakat. “Di politik ini saya mencari kawan sebanyak-banyaknya bukan musuh” ungkapnya.

Anton gemar bermain catur. Catur pun ia anggap sebagai ajang silaturahmi. Ia pernah menjuarai lomba catur saat kuliah di DIY Yogyakarta. “Main catur itu minimal ada canda tawa. Karena saat main catur bisa bareng-bareng, kecuali saat

perlombaan. Masyarakat juga banyak yang suka main catur,” ungkapnya.

Putra daerah Cirebon kelahiran 27 Oktober 1981 ini dikenal rendah hati. Ia mampu beradaptasi meskipun dengan orang yang baru ditemui. Kematangannya dalam menghadapi masyarakat tidak lepas dari pengalaman organisasi yang pernah ikuti dari bangku SMP hingga perguruan tinggi. “SMP saya ikut OSIS, SMA Pramuka, di kampus ikut LEM (Lembaga Eksekutif Mahasiswa), HMI, dan Dakwah kampus,” jelasnya.

Usai tamat SMAN 1 Sumber, ia melanjutkan ke Universitas Islam Indonesia (UII). Teknik kimia menjadi pilihannya. “Yogya itu berkesan. Tempatnya sederhana tapi nilai budayanya luar biasa dan harus dikembangkan di Cirebon kedepannya. Cinta budaya luar biasa,” harapnya.

Karakteristik Yogyakarta yang hampir sama dengan Cirebon menginspirasi untuk

mengembangkan sektor pariwisata di Cirebon. “Keraton ada, pantai ada, pegunungan ada, akses jalan mudah. Harusnya bisa seperti Yogyakarta,” pungkasnya.

Ia melanjutkan program magister di kampus STIMA IMI Jakarta dengan konsentrasi program manajemen. Kini Anton menempati Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon. Sederet persoalan masyarakat terpampang dihadapannya.

Kondisi yang membuatnya iba dan semakin menguatkan motivasinya berjuang demi masyarakat. Ia merasa bahwa dirinya lahir dari rakyat dan dipilih oleh rakyat, maka sudah menjadi kewajibannya untuk mewujudkan harapan masyarakat. “Tugas kita adalah berusaha dan berjuang, minimal ada niat dan usaha yang keras,” jelasnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar

Hasil Pemilu 2019 telah mencatat tujuh anggota partai Golkar yang sukses menduduki kursi DPRD Kabupaten Cirebon. Dari tujuh Dapil yang ada, semua terisi oleh perwakilan kader terbaik Golkar. Terlengkapinya anggota dewan di tujuh dapil Kabupaten Cirebon menjadi sinyal bahwa Partai Golkar masih mengakar dan dicintai. “Dari tujuh Dapil yang ada, Alhamdulillah ada semua perwakilan Golkar” jelas Anton.

Berikut anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Partai Golkar Periode 2019-2024: Dapil 1 ada Anton Maulana, ST, MM. Ia merupakan ketua Fraksi Partai Golkar. Posisinya memiliki peranan penting dalam mengkonsolidasikan semua anggota dewan dari Golkar. Dengan motto hidup “menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain” ia konsisten berkarya untuk masyarakat.



-foto: golkanpedia

Dapil 2 di isi oleh Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM. Sebagai putra daerah yang lahir pada tanggal 30 Desember 1952, ia menjadi dewan tertua di fraksi dan di DPRD Kabupaten Cirebon. Periode 2019 – 2024 ini merupakan periode ketiganya. Dengan sejumlah pengalaman yang dimiliki baik sebelum maupun saat menjadi anggota dewan, ia mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang cemerlang.

Berikutnya dari Dapil 3 ada H. Khanafi, SH, MH. Pria kelahiran Cirebon, 30 April 1968 ini secara struktur partai sebagai Wakil Bendahara DPD Partai Golkar. Beralamat di Desa Lemahtambah, Kecamatan Panguragan, ia terpilih menjadi anggota dewan Kabupaten Cirebon periode 2019 – 2024. Ia menempati komisi II yang membidangi perekonomian dan keuangan.

Dapil 4 di isi oleh Siska Karina, SH, MH. Sebagai anggota dewan perempuan yang lahir pada tanggal 09 September 1988, ia menjadi dewan termuda di fraksi Golkar. Periode 2019 – 2024 ini ia dipercaya masyarakat kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunung Jati, Kedawung, Tengah Tani, dan Talun. Ia konsisten berkarya untuk masyarakat melalui komisi IV.

Berikutnya dari Dapil 5 ada Teguh Rusiana Merdeka, SH. Pria kelahiran Cirebon, 02 Mei 1986 ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Dengan usianya yang terbilang muda ditambah pengalamannya menjadi TA DPR RI periode 2015 – 2019, ia mampu mengaktualisasikan pemikiran dan pengalamannya untuk memajukan Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya Diah Irwany Indriyati, S. Ap. Periode 2019 – 2024 ini ia dipercaya masyarakat Dapil 6 menjadi wakil rakyat. Sebagai anggota dewan perempuan senior yang lahir pada tanggal 09 Juli 1968, ia berkiprah dengan segudang pengalaman. Saat ini menjabat sebagai wakil ketua komisi 1 yang membidangi pemerintahan.

Terakhir dari Dapil 7 yaitu Yayat Hidayat, ST. Ia merupakan pimpinan Golkar Kecamatan Greged. Periode 2019 – 2024 ini ia dipercaya masyarakat Greged dan sekitarnya menjadi wakil rakyat. Pria kelahiran Cirebon 10 Desember 1973 ini berjuang di legislatif berada di komisi I bersama seniornya. Ia berkomitmen menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Cirebon. •mol

Wisata Religi Kaya Nilai Belum Berbingkai

Pusat peradaban Islam di Nusantara. Banyak situs yang masih berdiri tegak. Lantas kenapa wisata religi di Kabupeten Cirebon seolah berjalan di tempat?



Foto: foto alfan/De

Banyak sudah penelitian mengenai peninggalan peradaban Islam di Cirebon. Tak terhitung naskah akademis dihasilkan. Kabupaten Cirebon kaya situs bersejarah, dan tentu saja kaya nilai. Sebuah daya tarik wisata yang lengkap. Baik secara religi, budaya, peradaban, maupun arsitektur. Inilah sebenarnya modal utama pariwisata: daya tarik.

Pakar Naskah Kuno, Dr. R. Achmad Opan Safari Hasyim, M.Hum meyakini bahwa pusat peradaban Islam di Jawa Barat adalah di Cirebon. "Buktinya ada peninggalan keraton, masjid-masjid kuno, makam para wali, dan berbagai macam petilasan yang tersebar di tanah Cirebon," jelas Opan yang juga sebagai Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manasa) Jawa Barat.

Opan, juga dikenal sebagai filolog ini, meyakini bahwa segala peninggalan itu harusnya bisa menjadi magnet untuk pengembangan pariwisata. "Cirebon jika dikelola dengan baik, akan menjadi sebuah pusat wisata religi yang mampu mendatangkan wisatawan baik lokal maupun mancanegara," ujarnya.

Rata-rata wisatawan yang berkunjung ke Gunung Jati sebanyak 1.500 per hari. Jika malam Jumat atau akhir pekan bisa melonjak lima kali lipat. Namun okupansi mereka hanya sekira tiga jam saja berada di Cirebon.

"Saya emang tidak pernah lama kalau kesini, paling ziarah saja. Gimana ya, kurang nyaman soalnya. Pengemisnya gak wajar," jelas Abdullah (41), warga Tuban.

Abdullah tentu mewakili pengunjung lainnya.



Kondisi itu juga menjadi catatan Opan sebagai peneliti. "Mari kita jaga situs ini. Tapi lihatlah pedagang tidak tertata rapih, tidak ada *tour guide* profesional. Yang ada hanya para pengemis yang meminta-minta setiap penziarah datang," jelasnya.

Senada dengan Opan, R. Hasan Basori, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon mengatakan bahwa potensi destinasi wisata religi di Cirebon sangat besar. "Dari sisi, attractiveness, daya tarik sudah oke; Nah yang kurang aksesibilitas dan amenitas (kenyamanan)," jelas Basori.

"Kita punya tempat wisata yang banyak, tetapi tidak didukung oleh infrastruktur tambahan sebagai pendukung, koridor jalan dan kondisi lingkungan yang tidak baik, di-

tambah belum adanya Informasi yang terintegrasi secara online dengan sistemik," sambungnya.

Baginya masalah terbesar pengembangan wisata religi di Cirebon adalah penataan dan konsep yang tidak jelas. Dari sisi penunjang kenyamanan pengunjung belum ada pemandu wisata yang mumpuni, ketidakterseediaan hotel, hostel atau penginapan bagi pengunjung luar daerah.

"Ambil contoh Makam Sunan Gunung Jati, kelebihanannya mempunyai nilai sejarah, ada lahan parkir yang luas, pemandu wisata religinyapun sangat mumpuni tetapi SDM-nya oportunistis, kemudian jalur masuk yang kurang teratur, banyak pengemis, dan toilet yang kurang bersih," tuturnya.

Menurut Hasan, dalam 5

tahun terakhir ada 10-15 % pergeseran paradigma baru bagi wisatawan. Mereka cenderung menyukai pada tiga aspek: pertama, unsur religi (*spirituality*), kedua lingkungan (*environment*), dan ketiga kenyamanan (*convenience*).

"Cirebon sudah punya satu aspek yaitu keunggulan dalam *spirituality*, tinggal melengkapi dua aspek lagi agar wisata religi Cirebon lebih diminati," tandasnya.

Ada lima hal yang perlu dilakukan agar potensi wisata itu benar-benar menjadi nyata. Pertama pengembangan berbasis teknologi, "Wisatawan kekinian, akan melihat bagaimana transportasinya? Bagaimana penginapannya? Dia akan memilih melalui media informasi," ujar Hasan.

Langkah kedua kita harus punya *grand design* kawasan, rehabilitasi kawasan, penataan sosial dan lingkungan, agar tertata dengan baik. "Ini penting agar orang nyaman datang, dan bisa berlama-lama," jelasnya.

Langkah ketiga, membuat konektivitas antar wisata, wahana dan infrastruktur lainnya, agar terintegrasi dengan baik. Sebagai contoh, Makam Sunan Gunung Jati terkoneksi dengan Makam Mbah Sangkan Urip, terkoneksi dengan Batik Trusmi, dan terkoneksi dengan Tempat Kuliner Cirebon.

"Langkah keempat, membuat *narrative culture* dengan mengklasifikasikan objeknya, produknya, kulinernya, dan wisatanya. Terakhir, jika kita ingin mengembangkan dan menawarkan pengalaman luar biasa kepada pengunjung dan wisatawan, maka produk wisatanya harus tidak biasa, dan mempunyai sesuatu yang berbeda," tutupnya. •suf

Mohamad Luthfi



Internalisasi

“Selamat pagi Pak, untuk keperluan apa ya, bisa kami bantu?” ujar seorang satpam ramah. Sapaan yang membuat saya nyaman. Serasa memasuki kantor perbankan nasional. Padahal ini adalah bank milik pemerintah daerah.

Apa yang sebenarnya terjadi pada satpam, sehingga sedemikian ramah? Seolah tiada lelah terus memancarkan kenyamanan? Saya bertanya-tanya sepanjang jalan menuju kantor, usai dari bank tersebut.

“Sepertinya ada yang ingin dicapai oleh bank ini,” ucapku dalam hati. Saya buka aplikasi peramban di ponsel. Tercantum di dalam website bank itu: “Visi: Menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia.”

Ini rupanya yang membuat satpam itu sedemikian ramah. Ia paham betul pentingnya menjaga nasabah. Tidak mungkin menjadi bank besar, bahkan terbesar, kalau nasabahnya sedikit. Ramah adalah salah satu jimat agar nasabah tidak kabur ke bank lain.

Tiba di kantor, saya tanya beberapa ASN, mulai dari staf, eselon IV dan III secara random: “Apa visi Pak Bupati atau Kabupaten Cirebon?” Mereka menjawab sekenanya. “Dalam menjalankan tugas, adakah sesuatu yang menjadi penyemangat?” Rata-rata berpikirmnya pada karir pribadi.

Visi yang dirumuskan pemimpin, idealnya, menginternalisasi ke semua pegawai. Dalam contoh visi perbankan di atas. Betapa visi perusahaan sudah menginternalisasi pada diri satpam. Berwujud dalam keramahan demi menjaga nasabah dan menjadi bank terbesar.

Internalisasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris *internalisation* atau *internalization*. Dalam KBBI internasasi disejajarkan dengan kata penghayatan. Arti *internalisation* aslinya adalah “tindakan menerima atau menyerap ide, pendapat, kepercayaan, atau visi, sehingga menjadi bagian dari karakter dan berwujud pada perilaku.”

Sulit rasanya membayangkan Kabupaten Cirebon mewujudkan visinya, tanpa adanya internalisasi visi pada setiap pegawai. Jangankan internalisasi, redaksi visinya saja tidak tahu. Jika pegawainya

saja tidak tahu, bagaimana dengan *stakeholders* dan seluruh rakyat?

Internalisasi visi ke masyarakat itu justru kunci kemajuan. Provinsi Bali cukup berhasil menancapkan visi “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya.” Andalan Provinsi Bali adalah pariwisata budaya dan alam. Hanya dengan visi itulah kunci pariwisata Bali terjaga.

Masyarakat Bali sadar betapa pentingnya wisatawan, sehingga mempertahankan budaya dan memperlakukan wisatawan dengan baik sudah menjadi karakter dan perilaku mereka sehari-hari. Jika visi pemimpin sudah menginternalisasi pada rakyatnya, maka visi itu akan mudah dicapai.

Lembaran sejarah memberikan pelajaran bahwa pemimpin-pemimpin besar adalah mereka yang bervisi kuat, dan mampu menginternalisasikan visinya pada rakyatnya. Bung Karno, Soeharto, dan BJ Habibie adalah contoh pribadi visioner. Dengan caranya masing-masing, mereka mampu menginternalisasikan visinya kepada para pemangku kepentingan dan rakyat.

Bagaimana dengan Kabupaten Cirebon? Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 tertuang visi: Terwujudnya Kabupaten Cirebon, Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman.

Sungguh visi yang luar biasa. Harus diimbangi dengan upaya yang luar biasa. Tidak cukup ia hanya terpampang di dokumen RPJMD, apalagi hanya menjadi dokumen pelengkap saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah di KPU.

Ketika visi tidak menginternalisasi, susah rasanya mengajak pegawai bekerja keras mewujudkannya. Bayangkan, jika visinya ingin menciptakan daerah yang agamis, tapi ia bekerja hanya untuk kepentingan pribadi, bahkan korupsi, apa yang terjadi? Jauh panggang dari api.

Ini tugas kita semuanya agar visi itu menginternalisasi pada seluruh pegawai, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Ini bukan tugas dia, dia, atau dia. Tapi ini adalah tugas kita, tugas saya dan Anda. Mari mulai dari diri sendiri, sekarang. Emang mau kapan lagi?



SEKRETARIS DPRD DAN SELURUH PEGAWAI



Ikin Asikin, S.Sos., M.Si.
Sekretaris DPRD Kab. Cirebon



Wawan Siswandar, SE, M.Si.
(P11) Kabag Umum DPRD Kab. Cirebon /
Kabag Keuangan DPRD Kab. Cirebon



Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
Kabag Persidangan DPRD Kab. Cirebon



Drs. H. Sucipto, MM.
Kabag Perundang-undangan DPRD Kab. Cirebon

Mengucapkan Selamat

HARI JADI CIREBON KE

538



**PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**



H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Mengucapkan Selamat
HARI JADI CIREBON KE

538